

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohiim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, pembuatan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dapat terlaksana dengan baik. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selama 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan perubahan perangkat daerah maka juga terjadi perubahan rencana strategis instansi hal ini tidak terlepas dari perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2018-2023 memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran untuk perbaikannya sangat diharapkan dan sebelumnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Semoga awal Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua, untuk mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Jambi, 22 November 2022
KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

Mustari Affandi, AP, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750816 199311 1 001

	Hal.
Daftar Isi	I
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KOTA JAMBI TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI Tahun 2021	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP KOTA JAMBI	10
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP KOTA JAMBI..	15
2.4. Review terhadap Rancangan Kerja SATPOL PP KOTA JAMBI	19
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan	25
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	26
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SATPOL PP KOTA JAMBI	27
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	28
BAB IV : PENUTUP	30

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Walikota dalam menegakkan Perda, SK Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SATPOL PP KOTA JAMBI) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2022. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 memuat Program/kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.2.1. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kota Jambi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Terkait;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2008 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi.
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Jambi(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
20. Keputusan Walikota Jambi Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Jambi.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kota Jambi tahun 2022 dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. Merupakan penjabaran visi, misi dan program serta kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi, dengan memperhatikan Renstra, Rancangan Awal SATPOL PP KOTA JAMBI, Rancangan Awal RPJMD, dan RPJP Daerah serta memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga;
- c. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang merupakan indikasi program Satpol PP Kota Jambi ;

- d. Sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Satpol PP Kota Jambi tahun 2022 dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan resmi bagi Satpol PP Kota Jambi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Satpol PP Kota Jambi khususnya pembangunan tahunan daerah pada umumnya;
- b. Sebagai dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah;
- c. Pedoman kerja bagi Satpol PP Kota Jambi dalam melaksanakan penganggaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2022;
- d. Menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Satpol PP Kota Jambi pada setiap tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bab IV RENSTRA dan RENJA Satpol PP Kota Jambi Pasal 27 ayat (3) dan (4) ; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KOTA JAMBI TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI Tahun 2021
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP KOTA JAMBI
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP KOTA JAMBI
- 2.4. Review terhadap Rancangan SATPOL PP KOTA JAMBI
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SATPOL PP KOTA JAMBI
- 3.3. Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan Tahun 2022

BAB IV : PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI Tahun 2020 (n-1)**

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2021 terdiri dari 2 (Dua) program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan

A. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2021 (n-1) adalah :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** : Melalui Kegiatan (1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan target Kinerja masing-masing kegiatan 100% dan Realisasi...%
2. **Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum** : melalui Kegiatan (1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, (2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, (3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota. Dengan target masing-masing kegiatan 100% dan Realisasi....%

Kegiatan	Persentase
1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%
4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

Selanjutnya tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2021 (n-1) pada Satpol PP Kota Jambi.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan diantaranya adalah program/kegiatan yang dimaksud ditiadakan dan dihilangkan dari KUA dan PPAS dikarenakan ketidakcukupan Anggaran Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh rencana program/kegiatan yang diajukan Satpol PP Kota Jambi sehingga memerlukan skala prioritas.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan Satpol PP Kota Jambi, adalah tidak terpenuhinya dan optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah dibuat. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah membuat skala prioritas dengan lebih mengutamakan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan urusan dari pada program/kegiatan non urusan.

Matrik analisis rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Satpol PP Kota Jambi sampai dengan tahun berjalan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:


Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun Berjalan

Kota Jambi

3	4	5		6		7		8		9		10		11	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Outcome :Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	92%	774.682.500	76%	614.258.602		596.220.000				207.588.291	207.588.291			
	Output:Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Outcome :Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		923.171.500	90,29	833.520.400		597.400.000				215.209.800	215.209.800			
	Output: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur														
Program peningkatan disiplin aparatur	Outcome :Meningkatnya Disiplin Aparatur		117.850.000	98,30	115.850.000		-				0	0			
	Output :Terlaksananya Disiplin Aparatur														
Program Perencanaan SKPD	Outcome : Terwujudnya perencanaan strategis perangkat daerah		14.305.000	90,81	12.990.000		0				0	0			
	Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan strategis OPD														
Program Penyelenggaraan Trantibum, Serta Penegakan Regulasi Daerah	Outcome : Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibum dan Tranmas			0,00			5.069.000.000				2.039.320.250	2.039.320.250			
	Outcome : Terlaksananya Pengawasan, Penyidikan Dan Penegakan Regulasi Daerah dan Pengamanan, Pengawasan Serta Penertiban														

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

<p>Program Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>Outcome : Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja. Terlaksananya Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat</p>	<p>100%</p>	<p>987.900.000</p>	<p>85,56</p>	<p>845.232.500</p>		<p>798.718.800</p>				<p>349.183.800</p>		<p>349.183.800</p>		
---	---	-------------	--------------------	--------------	--------------------	--	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--------------------	--	--



 Juli 2021
 KEPADA SATELITAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA JAMBI
MUSTARI AEFANDI, AP. ME
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19750816 199311 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP KOTA JAMBI

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP Kota Jambi menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018, dengan sasaran target sesuai dengan Rensrta Satpol PP Kota Jambi dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Jambi berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang disesuaikan dengan dan mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023.
6. Keputusan Walikota Jambi Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Jambi.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Satpol PP Kota Jambi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

Sasaran target indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci), harus disesuaikan pula dengan sasaran target pada Renstra Satpol PP Kota Jambi dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program, kegiatan Dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Sumber : Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Akibat Penegakan Perda dan Perkada	100%	2022	Satpol pp Kota Jambi

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Perubahan Pelayanan SATPOL PP KOTA JAMBI
Satpol PP Kota Jambi Kota Jambi

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Target Renstra SATPOL PP KOTA JAMBI				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang Ditegakan		$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perwal yang ditegakan}}{\text{Jumlah Perda dan Perwal yang memuat sanksi}} \times 100\%$			$\frac{17 \text{ Perda dan Perwal}}{21 \text{ Perda dan Perwal}} \times 100\%$ 81%			81%		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP KOTA JAMBI

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Satpol PP Kota Jambi tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satpol PP Kota Jambi.

Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi Berisikan uraian mengenai :

- (1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Satpol PP Kota Jambi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satpol PP Kota Jambi;
- (2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi;
- (3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- (4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Jambi; dan
- (5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Sampai dengan tahun berjalan 2021 ini tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Satpol PP Kota Jambi 2018-2023 dalam hal pelayanan berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi adalah rata-rata telah mencapai sekitar 92 %, yang berarti hampir seluruh kegiatan yang menyangkut tugas, pokok dan fungsi satpol PP Kota Jambi dalam memberikan pelayanan khususnya bidang ketenteraman, ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat telah berjalan dengan baik. Pelayanan yang dilakukan Satpol PP Kota Jambi masih berkisar pada :

- Penertiban Pedagang Kaki Lima, Pengemis, dan anak jalanan
- Patroli Trantibmas guna pengawasan dan penataan PKL
- Pemeriksaan dan Pengawasan tempat-tempat hiburan dan izin usaha tertentu.
- Pengamanan demo dan unjuk rasa yang bersifat insidentil
- Pemeriksaan dan Pengawasan tempat-tempat hiburan dan sarana umum terkait penegakan petwal nomor 211 tahun 2020 tentang penanganan, pengawasan dan penindakan dampak Covid19.
- Penjagaan aset-aset daerah, serta pengamanan, dan pengawalan kegiatan pemerintah daerah

Namun pelayanan tersebut masih bersifat rutin, saat ini sampai pada tindak lanjut yang sifatnya berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi dan operasi yustisi yang berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan kejaksaan sehingga mengakibatkan efek jera bagi pelanggar ketertiban umum dan pelanggar peraturan daerah. Sehingga sering kali penertiban, penataan, pengawasan, dan pemeriksaan yang dilakukan menjadi mulai berfungsi dengan baik.

Tingkat pelayanan yang belum optimal ini juga dipicu oleh belum adanya kesatuan langkah para *stake holder* dalam menyikapi setiap permasalahan tramtibum untuk ditindaklanjuti pada penerapan sanksi administrasi yang di atur dalam Perda dan Perkada. Dan juga masih terlalu banyak kegiatan-kegiatan pelanggaran tramtibum justru di *backing* oleh orang-orang kuat baik dari kalangan birokrat maupun politisi.

Selanjutnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan terangkum dalam perincian sebagai berikut:

1. Permasalahan :

- Lemahnya kesadaran, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Menguatnya gejala perilaku asusila, dan infiltrasi budaya asing, dan masih tingginya pelanggaran Perda dan Perkada.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
- Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti : anak jalanan, gelandangan, pengangguran, dan pekerja seks komersial, anak punk,LGBT.

2. Hambatan :

- Belum terwujudnya penegakkan supremasi hukum dan HAM
- Tidak seimbangny jumlah personil Satpol PP Kota Jambi dengan penambahan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dan tingkat pelanggaran perda yang terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, luasnya cakupan daerah karena perkembangan dan perluasan kota yang berimplikasi pada timbulnya kantong-kantong rawan gangguan trantibmas baru, sehingga rasio penanganan dan penyelesaian kasus baik jumlah maupun kualitasnya tidak dapat dicapai secara optimal.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

- Kekurangan jumlah personil Satpol PP Kota Jambi juga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakkan perda sehingga harus dibuat skala prioritas. Akibatnya sulit untuk mewujudkan standar pelayanan minimal dan mengakomodir sistem penyelenggaraan trantibum dan penegakkan Perda yang baik.
- Terbatasnya jumlah aparatur personil Satpol PP yang memiliki kompetensi dan kapasitas dibidang PPNS dan Intelijen.
- Masih rendahnya dedikasi, loyalitas personil, dan kemampuan teknis dan operasional personil Satpol PP dalam menguasai dan memahami tugas, pokok, dan fungsi yang diemban. Hal ini sebagai akibat kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan terhadap bidang tugas yang dihadapi, dan adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh sebagian oknum personil Satpol PP untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk memenuhi rendahnya tingkat kesejahteraan yang diperoleh karena tidak seimbang volume pekerjaan dan resiko pekerjaan yang dihadapi.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan guna memperluas cakupan jangkauan pelayanan yang semakin besar seiring dengan perkembangan Kota.
- Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik lintas sektoral maupun lintas vertikal dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan walikota.
- Kurangnya komitmen dari pejabat struktural di lingkungan Satpol PP Kota Jambi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan mengacu kepada Renstra dan Renja yang telah dibuat.
- Kurang tertatanya manajemen dan administrasi pelaporan dan hasil pelaksanaan tugas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak bisa diketahui tingkat pencapaian target yang telah diperoleh.
- Kurangnya SDM yang diperlukan di bidang perencanaan program dan kegiatan, sehingga selalu terlambat dalam penyelesaian pelaporan sebagai bahan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari akumulasi permasalahan dan hambatan di atas apabila tidak direspon dengan bijak adalah bisa sampai pada tidak tercapainya target sasaran di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Jambi kedepan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Keterbatasan anggaran, jumlah personil, sarana dan prasarana serta SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas justru membuat Satpol PP Kota Jambi harus lebih inovatif dan kreatif dalam menyusun dan menentukan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mensukseskan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang disusun tersebut harus tepat pada sasaran dan mampu mengakomodir dan mencakup seluruh bentuk pelayanan di bidang ketertiban, ketenteraman umum serta penegakkan perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Penyusunan Kebijakan di bidang ketertiban, ketenteraman umum serta penegakkan perda sedapat-dapatnya telah melibatkan dan mengakomodir berbagai kepentingan dari para *stake holder*, sehingga Program dan Kegiatan yang terlaksana adalah benar-benar telah sesuai dengan arah pencapaian yang diharapkan.

Peluang yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan adalah peningkatan struktur kelembagaan yang telah diakomodir dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, tugas perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Selain itu Peraturan Pemerintah ini mensyaratkan pula harus adanya perubahan dalam struktur organisasi dan eselon Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Indonesia dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Permendagri diundangkan. Melalui Peraturan Pemerintah dan Permendagri dimungkinkan Satpol PP Kota Jambi untuk meningkatkan kelembagaannya menjadi Eselon II/b.

Hal ini sangat berarti bagi Satpol PP Kota Jambi dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan yang akan dilakukan, khususnya dalam hal koordinasi dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta penegakkan perda dengan Kejaksaan, Pengadilan, dan TNI/POLRI.

Dari penjabaran dan uraian di atas, maka formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk Satpol PP Kota Jambi pada tahun yang 2020 adalah sebagai berikut :

Penegakkan Peraturan Daerah dengan Operasi Yustisi Terpadu yang melibatkan unsur Kejaksaan, Pengadilan, TNI/ Polri dan Instansi Terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

- Terciptanya suatu sistem penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal di bidang Ketertiban Umum dan Penegakkan Perda. Pertambahan Jumlah Personil Satpol PP Kota Jambi.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.
- Pertambahan Jumlah Aparatur SDM Polisi Pamong Praja yang memiliki kompetensi dan Kapasitas di bidang perencanaan, keuangan, PPNS, dan Intelijen.
- Tertib Administrasi Pelayanan dan Akuntabilitas Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- Terwujudnya supremasi hukum yang adil bagi semua pelanggar masalah tramtibum dan linmas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal SATPOL PP KOTA JAMBI

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kota Jambi tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2021, program indikatif di tahun 2021 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2015-2020, telaah prioritas RPJMN 2016-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023.

Berisikan uraian mengenai :

- (1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Satpol PP Kota Jambi dengan hasil analisis kebutuhan;
- (2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- (3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Satpol PP Kota Jambi, misalnya : terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan awal Satpol PP Kota Jambi, atau program, kegiatan dan sub kegiatan namun besarnya berbeda;

Untuk Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Kota Jambi tahun 2021, bagian ini sudah mendapatkan porsi penjelasan dan dapat dikerjakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Satpol PP Kota Jambi kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Satpol PP Kota Jambi Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

- (1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program, Kegiatan Sub Kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- (2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Jambi;

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang – undangan yang ditarget pada tahun 2018 sejumlah 33 Provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang berkapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Berbagai program prioritas tersebut didukung oleh rangkaian program pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. Dalam hal ini dalam upaya mewujudkan Misi Kedua, yaitu : **Penguatan Penegakan Hukum, Tranmas Dan Kenyamanan Masyarakat**, maka program pembangunan yang akan dilakukan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Sesuai dengan **Permandagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah**, Berdasarkan hasil Mapping program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:

- (1) **Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.** Terdiri Dari 3 (Tiga) Kegiatan Dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan.
- (2) **Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Terdiri Dari 8 (Delapan) Kegiatan, Dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan

Selanjutnya dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi periode 2018–2023 yang memuat pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Satpol PP terletak pada Arah kebijakan dari sasaran dan tujuan Misi-2.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SATPOL PP KOTA JAMBI

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Satpol PP Kota Jambi Tahun 2018 -2023.

1. Tujuan

- Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Sasaran

- Menurunkan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Perda Dan Perwal.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2022 terdiri dari :

1. **Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum:**
Indikator Program : Persentase penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Perda dan Perwal.

1.1 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator (Outcome) : Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

- 1.1.1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah Dini. Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Indikator (Output) : Jumlah Pencegahan Gangguan TrantibumJumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Pendanaan : APBD

- 1.1.2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Indikator (Output) : Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan

Pendanaan : APBD

- 1.1.3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Pendanaan : APBD

- 1.1.4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator (Output) : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pendanaan : APBD

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

1.1.5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Indikator (Output) : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Pendanaan : APBD

1.2 Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota.

Indikator (Outcome) : Persentase Penegakan PERDA dan PERATURAN WALIKOTA

Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

1.2.1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota.

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pendanaan : APBD

1.2.2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Jambi

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP

Pendanaan : APBD

1.3 Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Indikator (Outcome) : Jumlah Pembinaan PPNS

Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

1.3.1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada

Pendanaan : APBD

2. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Program : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

2.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator (Outcome) : Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pendanaan : APBD

2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator (Output) : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pendanaan : APBD

2.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator (Outcome) : Tertib administrasi keuangan
Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator (Output) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Pendanaan : APBD

2.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pendanaan : APBD

2.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Pendanaan : APBD

2.3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator (Outcome) : Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah
Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

2.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator (Output) : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pendanaan : APBD

2.4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator (Outcome) : Tertib administrasi kepegawaian
Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

- 2.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator (Output) : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendanaan : APBD
- 2.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator (Outcome) : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Pendanaan : APBD

2.5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator (Outcome) : Tertib Administrasi Umum
Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

- 2.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator (Output) : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Pendanaan : APBD
- 2.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator (Output) : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Pendanaan : APBD
- 2.6.1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator (Output) : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Pendanaan : APBD
- 2.6.2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Pendanaan : APBD
- 2.6.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Indikator (Output) : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pendanaan : APBD
- 2.6.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator (Output) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pendanaan : APBD
- 2.6.5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pendanaan : APBD
- 2.6.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pendanaan : APBD

2.6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator (Outcome): Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

- 2.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator (Output) : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Pendanaan : APBD
- 2.6.2. Pengadaan Mebel
Indikator (Output) : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pendanaan : APBD
- 2.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator (Output) : Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pendanaan : APBD
- 2.6.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator (Output) : Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pendanaan : APBD

2.7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator (Outcome): Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

- 2.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pendanaan : APBD
- 2.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Pendanaan : APBD
- 2.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator (Output) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pendanaan : APBD

2.8. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator (Outcome): Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

- 2.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator (Output) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pendanaan : APBD

- 2.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator (Output) : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pendanaan : APBD

- 2.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator (Output) : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pendanaan : APBD

- 2.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator (Output) : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas
Pendanaan : APBD

TABEL 3.3
RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN. DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI KOTA JAMBI
2018-2023

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Lokasi	Rencana Tahun 2022		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		APBD KOTA	APBD PROV	APBN	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12		
1	05	02			2. Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Jambi	76%	7.202.807.820	-	79%	6.310.856.204	80%	12.621.712.408	APBD		
1	05	02	2.01		1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	70%	6.338.571.620	-	65%	5.690.779.857	100%	11.381.559.714	APBD		
1	05	02	2.01	01	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Jambi	200 Kasus	2.447.505.000		240 Kasus	2.265.854.500	528 Kali patroli Siaga Trantibum	2.492.439.950	APBD		
1	05	02	2.01	02	2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Jambi	120 Kasus	2.932.223.640		20 Kasus	2.313.381.340	Skala Kecil=13 kali, Skala Sedang=9 Kali, Sakala Besar=3 kali, 171 Orang Anggota PTT	2.544.719.474	APBD		
1	05	02	2.01	03	3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Jambi	10 Dokumen	185.086.950		10 Dokumen	213.517.500	9 kali Kordinasi	234.869.250	APBD		
1	05	02	2.01	04	4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Jambi	4 Dokumen	416.019.130		4 Dokumen	387.999.225	16 Orang Linmas, 4 Orang Anggota PTT	426.799.148	APBD		

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

1	05	02	2.01	05		5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Jambi	229 Orang	357.736.900		120 Orang	510.027.292	15 Orang	561.030.021	APBD		
1	05	02	2.01	07		6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan	Kota Jambi		-			-			APBD		
1	05	02	2.01	08		8. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kota Jambi	-	-			-			APBD		
1	05	02	2.01	09		9. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Trantibum dan Linmas	Kota Jambi		-			-					
1	05	02	2.01	10		10. Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Perda dan Perkada		Kota Jambi	-	-			-					
1	05	02	2.02			2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perwal	Kota Jambi	54%	417.788.000	-	56%	383.711.809	100%	767.423.618	APBD		
1	05	02	2.02	01		1. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota Yang Memuat Sanksi	Kota Jambi		-				8 Kali		APBD		
1	05	02	2.02	02		2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Jambi	24 Lapooran	116.755.500		24 Laporan	100.939.340	2 Kali	201.878.680	APBD		
1	05	02	2.02	03		3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kota Jambi	36 Laporan	301.032.500		36 Laporan	282.772.469	Skala Kecil=20 kali, Skala Sedang=15 Kali, Sakala Besar=5 kali, 7 Orang Anggota PTT	565.544.938	APBD		
1	05	02	2.03			3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kota Jambi	11 Orang	446.448.200	-	13 Orang	236.364.538	100%	472.729.076	APBD		
1	05	02	2.03	01		1. Pengembangan Kapasitas Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kota Jambi	1 Laporan	446.448.200		1 Laporan	236.364.538	9 Orang	472.729.076	APBD		

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

1	05	02			1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Jambi	BB	9.140.851.793	-	BB	8.060.143.796	100%	16.120.287.592	APBD		
1	05	02	2.01			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Kota Jambi	BB	272.241.700	-	BB	148.616.267	100%	297.232.534	APBD		
1	05	02	201	01		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	8 Dokumen	155.872.800		7 Dokumen	65.495.787	Renstra= 1 Dokumen, Renja= 1 Dokumen.	130.991.574	APBD		
1	05	02	201	02		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	-			0	RKT, RKA, DPA (RKT-P, RKA-P, DPA-P)	0	APBD		
1	05	02	201	03		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	-			-	LAKIP, LPPD/TAHUNAN	0	APBD		
1	05	02	201	04		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	-			-	5 Kali Koordinasi	0	APBD		
1	05	02	201	05		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	-			-	1 Laporan	0	APBD		
1	05	02	201	06		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jambi	4 Dokumen	116.368.900		3 Laporan	83.120.480		166.240.960			
1	05	02	201	07		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	3 Dokumen	-					0			
1	05	01	2.02			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	100%	5.455.571.996	-	100%	5.566.506.674	100%	6.038.161.405			
1	05	02	2.02	01		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	612 Orang/Bulan	5.145.377.496		612 Orang/Bulan	5.207.018.460	55 Orang ASN Dan 8 Orang Anggota PTT	10.414.036.920			
1	05	02	2.02	02		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi					-		0			
1	05	02	2.02	03		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	2 Dokumen	215.160.000		1 Dokumen	186.240.000		372.480.000			
1	05	02	2.02	04		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	95.034.500		1 Dokumen	173.248.214		346.496.428			
1	05	02	2.02	05		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	3 Dokumen				-		-			

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

1	05	02	2.02	06		6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	5 Dokumen										
1	05	02	2.02	07		7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	5 Dokumen										
1	05	02	2.02	08		8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	1 Dokumen										
1	05	02	2.02	09		9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	1 Laporan				1 Laporan						
1	5	1	2.03			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Jambi	100%	44.509.000	-	100%	32.238.960						
1	5	1	2.03	6		1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dokumen	44.509.000		1 Dokumen	32.238.960				64.477.920		
1	05	01	2.05			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	Kota Jambi	100%	359.760.000	-	100%	249.715.000				499.430.000		
1	05	01	2.05	02		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	2 Paket	249.760.000		3 Paket	172.015.000				344.030.000		
1	05	01	2.05	09		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jambi	20 Orang	110.000.000		1 Paket	77.700.000				155.400.000		
1	05	02	2.03			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Kota Jambi	100%	420.029.807	-	100%	421.052.155				842.104.310		
1	05	02	2.06	01		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	16.928.500		1 Paket	9.636.616				19.273.232		
1	05	02	2.06	02		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	4 Paket	53.376.620		5 Paket	62.154.405				124.308.810		
1	05	02	2.06	05		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	23.939.300		1 Paket	10.319.670				20.639.340		
1	05	02	2.06	06		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Dokumen	13.559.887							0		
1	05	02	2.06	08		5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	2 Laporan	16.540.000		1 Laporan	17.890.000	0			35.780.000		

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

1	05	02	2.06	06		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Dokumen	13.559.887			luran Asuransi Kesehatan/BPJ S Kesehatan, luran Jaminan Kecelakaan Kerja/IKK	0				
1	05	02	2.06	08		5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Jambi	2 Laporan	16.540.000		1 Laporan	17.890.000	0	35.780.000			
1	05	02	2.06	09		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	2 Laporan	224.300.000		2 Laporan	251.000.000		502.000.000			
1	05	02	2.06	10		7. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	37.785.500		1 Dokumen	20.251.464		40.502.928			
1	05	02	2.06	11		8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Jambi	8 Orang	33.600.000		2 Dokumen	49.800.000	5 Orang CS	99.600.000			
1	05	01	2.07			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	100%	1.079.074.090	-	100%	166.165.890		332.331.780			
1	5	1	2.07	2		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Pengawasan Kepala Daerah atau Lapangan	kota Jambi	6 Unit	770.000.000			-		0			
1	05	01	2.07	05		2. Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Jambi	29 Unit	128.852.955		6 Unit	19.649.220		39.298.440			
1	05	01	2.07	06		3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Jambi	25 Unit	170.221.145		7 Unit	146.516.670		293.033.340			
1	05	01	2.07	11		14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Jambi	25 Unit	9.999.990			-		0			
1	05	01	2.08			7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	100%	703.525.200	-	100%	813.069.200		1.626.138.400			
1	05	01	2.08	01		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	3 Laporan	29.450.000		3 Laporan	19.950.000		39.900.000			
1	05	01	2.08	02		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Jambi	2 Laporan	192.500.000		3 Laporan	231.000.000		462.000.000			
1	05	01	2.08	04		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	4 Laporan	481.575.200		4 Laporan	562.119.200		1.124.238.400			

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2022

1	05	01	2.09			8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	100%	806.140.000	-	100%	662.779.650	1.325.559.300			
1	05	01	2.09	01		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Jambi	6 Unit	-		0	-	0			
1	05	01	2.09	02		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Jambi	35 Unit	679.337.500		35 Unit	583.166.850	1.166.333.700			
1	05	01	2.09	06		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Jambi	38 Unit	27.962.000		14 Unit	30.217.800	60.435.600			
1	05	01	2.09	09		4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Jambi	1 Unit	27.500.000		1 Unit	49.395.000	98.790.000			
1	05	01	2.09	10		5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	1 Unit	71.340.500			-	0			
										16.343.659.613	-	-	14.371.000.000	24.661.640.805			

Jambi, 31 Desember 2022
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Jambi

 Mustari Affandi, AP, ME
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19750816 199311 1 001

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Satpol PP Kota Jambi disusun dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan yang telah ditentukan dalam rencana awal RPJP Kota Jambi Bab 4 Penutup, yaitu sebagai berikut :

1. Renja Satpol PP Kota Jambi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Jambi 2018-2023 dan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Kota Jambi Tahun 2018-2023.
2. Renja ini diharapkan telah dapat menjabarkan Visi, Misi, dan Program Walikota Jambi terpilih 2018-2023 dan Visi, Misi Satpol PP Kota Jambi yang sesuai dengan tupoksi Satpol PP Kota Jambi.
3. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2021 akan dijamin pelaksanaan dengan sebaik-baiknya dan konsistensinya antara RPJP Kota Jambi dan Renstra Satpol PP Kota Jambi.
4. Renja yang disusun diharapkan telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan dipantau serta di evaluasi oleh Bappeda Kota Jambi untuk menjaga ke efektifan pelaksanaannya melalui Forum Satpol PP Kota Jambi dan Musrenbang Kota Jambi



Jambi, Januari 2022
Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Mustari Affandi, AP, ME
Pembina Utama Muda
Nip. 19750816 199311 1 001